Pengaruh Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi, dan *Debt Service Coverage Ratio* terhadap *Financial Distress*

Muhammad Muhaiminul Azizul Khakim¹, Siti Arifah¹, Mumpuni Wahyudiarti Sitoresmi¹

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Indonesia

*email: azizulhk58@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of financial independence, degree of decentralization, and Debt Service Coverage Ratio (DSCR) on financial distress in district / city local governments in Central Java Province. This research uses a quantitative descriptive and associative approach with a panel data design that combines cross section and time series data during the 2019-2023 period. Based on RDT theory, this study tests the hypothesis that fiscal dependence on the central government can increase the risk of financial distress. The research sample consists of 35 local governments with 175 observations, selected through purposive sampling based on the availability of LKPD audited by BPK. Data analysis was conducted using panel data regression with EViews 12 software. The results showed that financial independence, degree of decentralization, and DSCR had a negative and significant effect on financial distress. This finding indicates that increasing own-source revenues, optimizing fiscal decentralization, and prudent debt management can reduce the risk of financial distress. Simultaneously, the three variables prove the importance of regional fiscal independence in accordance with RDT.

ABSTRAK

Kata Kunci:
Financial Distress;
Kemandirian
Keuangan;
Derajat
Desentralisasi;
DSCR

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan asosiatif kuantitatif dengan desain data panel yang menggabungkan data cross section dan time series selama periode 2019-2023. Berdasarkan teori RDT, penelitian ini menguji hipotesis bahwa ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dapat meningkatkan risiko *financial distress*. Sampel penelitian terdiri dari 35 pemerintah daerah dengan 175 observasi, dipilih melalui *purposive sampling* berdasarkan ketersediaan LKPD yang telah diaudit BPK. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan *software EViews 12*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, dan DSCR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD, optimalisasi desentralisasi fiskal, dan pengelolaan utang yang prudent dapat mengurangi risiko *financial distress*. Secara simultan, ketiga variabel tersebut membuktikan pentingnya kemandirian fiskal daerah sesuai RDT.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 dan 25 Tahun 1999, pengelolaan keuangan publik di Indonesia mengalami pergeseran paradigma dari model sentralistik

menuju sistem yang lebih desentralistik. Sampai saat ini, dampak keuangan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pemerintah daerah masih sangat tinggi, khususnya di Provinsi Jawa Tengah (DJPK Kemenkeu, 2024). Hal ini mencerminkan lemahnya kemandirian keuangan daerah yang berpotensi menimbulkan kondisi *financial distress*, yaitu kesulitan keuangan yang mengancam kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi operasional dan pelayanan publik (Rahmatika & Imron, 2022).

Hal ini sejalan dengan konsep Resource Dependence Theory (RDT), yang berpendapat bahwa ketergantungan berlebih pada sumber daya dari luar organisasi dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan saat terjadi perubahan kebijakan atau ketidakterpenuhinya kebutuhan sumber daya tersebut Galiński, (2023); Nashrullah & Khomsiyah, (2024). Menurut Pfefefer & Salancik, (1978), organisasi yang terlalu bergantung pada sumber daya eksternal akan rentan terhadap ketidakstabilan saat terjadi perubahan alokasi atau akses terhadap sumber daya tersebut. Dalam konteks daerah, ketergantungan pada dana transfer dapat memperlemah kemampuan fiskal, terutama ketika PAD tidak mampu menopang kebutuhan operasional dan pembangunan (Mulyani & Fitra, 2023).

Kenyataan ini tercermin dalam APBD Jawa Tengah tahun 2023, di mana aliran dana transfer dari pemerintah pusat masih mendominasi hingga 185% dibandingkan PAD, menandakan bahwa sebagian besar pembiayaan daerah masih ditopang oleh pemerintah pusat DJPK, (2024). Jika kondisi ini berlanjut tanpa adanya peningkatan kemandirian dan efisiensi fiskal, maka daerah akan rentan mengalami tekanan keuangan, seperti yang dialami Kabupaten Brebes (Harsanto, 2024).

Penelitian mengenai *financial distress* pemerintah daerah telah dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya, namun menunjukkan hasil yang belum konsisten. Misalnya, Subhan et al., (2024) menemukan bahwa derajat desentralisasi dapat meningkatkan risiko *distress* karena lemahnya kapasitas manajerial. Sebaliknya, Winarna et al., (2017) menyatakan bahwa desentralisasi yang optimal justru mampu mengurangi tekanan fiskal. Selain itu, indikator *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) juga menunjukkan pengaruh yang beragam terhadap *financial distress*, tergantung pada pengelolaan utang daerah (Sarumaha et al., 2021).

Berdasar pada fenomena yang ada serta kesenjangan temuan riset sebelumnya, studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, dan DSCR terhadap *financial distress* pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019–2023. Diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan empiris dalam memahami kompleksitas permasalahan fiskal di daerah serta menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan peningkatan keberlanjutan fiskal daerah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperoleh dari DJPK, BPS, dan BPK RI.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan sampel berdasarkan ketersediaan dan kelengkapan data selama periode 2019-2023. Dari total populasi, diperoleh 35 pemerintah daerah yang memenuhi kriteria, menghasilkan total 175 observasi.

Financial Distress: Rasio *Financial Distress* adalah indikator yang mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban fiskalnya serta mendeteksi potensi ketidakstabilan keuangan berdasarkan model Altman *Z-Score* yang telah diadaptasi untuk sektor pemerintahan (Altman, 1968)

$$FD = 1,2 \times \left(\frac{AL - KL}{TA}\right) + 1,2 \times \left(\frac{SAL}{TA}\right) + 1,2 \times \left(\frac{PO - BO}{TA}\right) + 1,2 \times \left(\frac{PAD}{TA}\right) + 1,2 \times \left(\frac{TPD}{TA}\right)$$

Keterangan:

- FD : *Financial Distress*
- TA : Total Aset
- AL : Aset Lancar
- KL : Kewajiban Lancar
- SAL : Saldo Anggaran Lebih
- PO : Pendapatan Operasional
- BO : Belanja Operasional
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- TPD : Total Pendapatan Daerah

Kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan Pemda untuk mengeksekusi hak-hak keuangannya secara efektif dan efisien. Kemandirian keuangan ini bisa dihitung berdasarkan 2 rasio yaitu total PAD dibagi total pendapatan dan total PAD dibagi total belanja (Ritonga, 2023).

$$KK = \frac{PAD}{BD} \times 100\%$$

Keterangan:

- KK : Kemandirian Keuangan
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- BD : Belanja Daerah

Derajat Desentralisasi: Rasio derajat desentralisasi digunakan untuk menurunkan tingkat kemandirian pemerintah daerah guna memperoleh PAD dibandingkan dengan total pendapatan daerah (Mahmudi, 2019)

$$DD = \frac{PAD}{PD} \times 100\%$$

Keterangan:

- KK : Derajat Desentralisasi
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- PD : Pendapatan daerah

Debt Service Coverage Ratio (DSCR): DSCR merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan pembayaran utang jangka pendek atau jangka panjang yang jatuh tempo pada waktu tertentu dengan menggunakan dana yang diperoleh dari daerah. (Mahmudi, 2019)

$$DSCR = \frac{PAD + DT}{CPU + BU} \times 100\%$$

Keterangan:

DSCR : *Debt Service Coverage Ratio*

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DT : Dana Transfer

CPU : Cicilan Pokok Utang

BU : Bunga Utang

Variabel Kontrol

Size Daerah: ukuran besar kecilnya kapasitas ekonomi suatu pemerintah daerah yang biasanya diukur melalui logaritma natural dari total aset atau total pendapatan daerah, yang mencerminkan potensi fiskal dan kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik (Lathifa & Haryanto, 2019)

$$SD = \ln(TA)$$

Keterangan:

SD : *Size Daerah*

Ln : logaritma natural

TA : Total Aset

Efisiensi Belanja: rasio yang digunakan untuk menentukan sejauh mana pemerintah daerah mampu memanfaatkan pendapatan yang dimiliki untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah secara efektif. Semakin kecil nilai rasio ini, menunjukkan semakin efisien kinerja fiskal daerah karena belanja tidak melebihi kapasitas pendapatan yang tersedia (Mahmudi, 2019)

$$EB = \frac{BD}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan:

EB : Efisiensi Belanja

BD : Belanja Daerah

TPD : Total Pendapatan Daerah

Teknik analisis data menggunakan regresi data panel yang menggabungkan data *cross-section* dan *time-series*. Pengujian model dilakukan melalui uji *Chow* dan *Hausman* untuk menentukan model terbaik. Berdasarkan hasil pengujian, model *Fixed Effect Model* (FEM) dipilih sebagai model paling sesuai.

Sebelum estimasi regresi, dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Selanjutnya, uji hipotesis dilakukan melalui uji *t* (*parsial*), uji *F* (*simultan*), dan koefisien determinasi (R^2). Analisis ini dilakukan dengan *software EViews 12*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	FD	KK	DD	DSCR	SD	EB
<i>Mean</i>	0,6506	0,5472	0,1963	105,0459	28,2321	0,7081
<i>Maximum</i>	1,7400	0,9600	0,5300	756,8400	30,2500	0,9400
<i>Minimum</i>	0,0400	0,2600	0,1000	19,4000	0,0000	0,5700
<i>Std. Dev</i>	0,3221	0,1579	0,0730	99,0760	4,8671	0,0766
<i>Observations</i>	175	175	175	175	175	175

Sumber: Data diolah

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami *financial distress* rata-rata 0,6506 (kategori sedang), dengan variasi cukup tinggi (std. dev. 0,3221). Kemandirian keuangan rata-rata 0,5472 mengindikasikan ketergantungan pada transfer pusat, sementara derajat desentralisasi rata-rata 0,1963 mencerminkan kontribusi PAD yang masih rendah. DSCR rata-rata 105,0459 menandakan kemampuan membayar utang yang sangat baik, meskipun beragam antar daerah (std. dev. 99,0760). *Size* daerah rata-rata 28,2321 menunjukkan ukuran fiskal yang besar dengan variasi tinggi, dan efisiensi belanja rata-rata 0,7081 (70%) relatif homogen antar daerah. Hasil ini mengungkap ketimpangan fiskal serta tantangan dalam optimalisasi desentralisasi.

Uji T (*Parsial*)

Tabel 2. Hasil *Parsial* (t)

Variabel	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>	Prob	Keterangan
C	-52,5334	-12,9502	0,0000	
KK	-0,3526	-2,7287	0,0072	Signifikan
DD	-1,4031	-12,4044	0,0000	Signifikan
DSCR	-0,0610	-3,0222	0,0030	Signifikan
SD	1,6860	12,0401	0,0000	Signifikan
EB	3,4739	13,3218	0,0000	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil analisis menunjukkan bahwa kemandirian keuangan (KK), derajat desentralisasi (DD), dan DSCR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*, menandakan bahwa otonomi fiskal dan kemampuan membayar utang yang tinggi dapat mengurangi tekanan keuangan, sesuai dengan *Resource Dependence Theory* (RDT). Sebaliknya, ukuran daerah (SD) dan efisiensi belanja (EB) justru berpengaruh positif-signifikan, mengindikasikan bahwa kompleksitas birokrasi pada pemerintah besar serta efisiensi belanja yang tidak strategis dapat meningkatkan kerentanan fiskal. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai stabilitas fiskal jangka panjang.

Uji F (*Simultan*)Tabel 3. Hasil Uji F (*Simultan*)

Kategori	Nilai
<i>F-statistik</i>	71,6894
<i>Prob(F-statistik)</i>	0,0000

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil uji F-statistik sebesar 71,6894 (signifikansi 0,0000) membuktikan bahwa secara simultan, variabel kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, DSCR, serta variabel kontrol (*size* daerah dan efisiensi belanja) berpengaruh signifikan terhadap *financial distress* pemerintah daerah di Jawa Tengah periode 2019-2023, yang mengindikasikan bahwa model regresi secara keseluruhan layak dan mampu menjelaskan hubungan antar variabel.

Koefisien Determinasi (R^2)Table 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Adjusted R-Squared</i>	0.9406
---------------------------	--------

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil analisis menunjukkan nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,9406 (94,06%), yang berarti variabel independen (kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, DSCR, ukuran daerah, dan efisiensi belanja) secara kolektif mampu menjelaskan 94,06% variasi *financial distress* pada kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2019-2023, sementara sisanya 5,94% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap *Financial Distress* Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kemandirian keuangan secara signifikan mengurangi *financial distress* pada pemerintah daerah, sesuai dengan *Resource Dependence Theory*. Hasil ini didukung oleh penelitian sebelumnya Oktaviani & Sari (2020), Rahmatika & Imron, (2022), serta Sari & Arza (2019) yang menunjukkan bahwa ketergantungan yang lebih rendah pada transfer pusat melalui peningkatan PAD menghasilkan stabilitas fiskal yang lebih baik. Temuan ini menyoroti pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah sebagai strategi mitigasi *financial distress* dalam era desentralisasi.

Pengaruh Derajat Desentralisasi terhadap *Financial Distress* Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023

Temuan penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*, di mana semakin tinggi proporsi PAD dalam pendapatan daerah, semakin rendah risiko tekanan keuangan. Hasil ini memperkuat penerapan *Resource Dependence Theory* dalam konteks pemerintahan

daerah, sekaligus mendukung penelitian sebelumnya Anjani et al. (2024) Sari & Arza (2019) yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal yang efektif dapat meningkatkan ketahanan keuangan daerah melalui penguatan kemandirian fiskal dan pengurangan ketergantungan pada transfer pusat.

Pengaruh DSCR terhadap *Financial Distress* Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa kemampuan membayar utang (DSCR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*, di mana kapasitas fiskal yang kuat dalam memenuhi kewajiban utang dapat mengurangi risiko tekanan keuangan. Sesuai *Resource Dependence Theory*, pengelolaan utang yang efektif mencerminkan berkurangnya ketergantungan pada sumber eksternal dan meningkatnya stabilitas fiskal. Hasil ini sejalan dengan penelitian Fany et al. (2025), Rahmatika & Imron (2022) yang menegaskan bahwa efisiensi pengelolaan utang dan kapasitas fiskal yang memadai merupakan faktor kunci dalam pencegahan *financial distress*.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data panel dengan model *fixed effect* pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah periode 2019-2023, penelitian ini menemukan bahwa kemandirian keuangan dan derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*, menunjukkan bahwa daerah dengan PAD yang kuat dan implementasi desentralisasi yang efektif lebih tahan terhadap tekanan keuangan. DSCR yang tinggi juga berpengaruh negative signifikan, mengindikasikan bahwa pengelolaan utang yang efisien melalui kemampuan pembayaran yang baik turut menurunkan risiko *financial distress*. Temuan ini secara kolektif menegaskan pentingnya penguatan pendapatan asli daerah, desentralisasi fiskal yang berkualitas, serta pengelolaan pembiayaan yang prudent sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas fiskal pemerintah daerah di Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Altman, E. I. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. *The Journal of Finance*, 23(4), 589–609. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00843.x>
- Anjani, R. R., Maria, & Armaini, R. (2024). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Financial Distress pada Pemerintahan Provinsi di Sumatera*. 24(3), 2846–2851. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i3.5561>
- Djpk.Kemenkeu. (n.d.). *UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=339>
- DJPK Kemenkeu. (2024). *Laporan Perkembangan Ekonomi Dan Fiskal Daerah*. 24.
- Eliza, I., Nelly, M., & Dwitayanti, Y. (2024). *Analisis Pengaruh Solvabilitas dan Derajat Desentralisasi Terhadap Financial Distress Provinsi Di Indonesia* Intan Eliza 1, Nelly Masnila 2, Yevi Dwitayanti 3. 117–130.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.31851/jmediasi.v7i1.16580>
- Fany, A. R., Wahidahwati, W., & Fidiana, F. (2025). *Influence of Accounting Policies on Financial Distress: The Moderating Role of Corporate Governance*. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i01.p18>
- Galiński, P. (2023). Importance of the Size of Local Government in Avoiding the Fiscal Distress – Empirical Evidence on Communes in Poland. *Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio H – Oeconomia*, 56(5), 101–113. <https://doi.org/10.17951/h.2022.56.5.101-113>
- Harsanto, A. T. (2024). *Daftar Lengkap Dana Transfer ke Daerah 2025 Provinsi, Kota, Kabupaten se-Jawa Tengah Rp 70 Triliun*. Tribun Batam.
- Indriaty, N., Setiawan, D., & Pravasanti, Y. A. (2019). The Effects of Financial Ratio, Local Size and Local Status on Financial Distress. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 3(01), 38. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v3i01.381>
- Lathifa, H., & Haryanto. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(2), 2337–3806. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (3rd ed.). UPP STIM YKPN. http://library.ukdw.ac.id/main/opac/index.php?p=show_detail&id=44176
- Mulyani, S., & Fitra, H. (2023). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal di Kabupaten/Kota Sumatera Barat. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(2), 135–144. <https://doi.org/10.24036/jnka.v1i2.11>
- Nashrullah, M. H., & Khomsiyah, K. (2024). The Effect of Regional Financial Management on Financial Distress of Local Government in Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5(07), 1616–1628. <https://doi.org/10.59141/jiss.v5i07.1173>
- Oktaviani, M. A., & Sari, D. P. (2020). Pengaruh kemandirian daerah, kinerja pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 186–193. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1147>
- Pfefef, J., & Salancik, G. R. (1978). *The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective* (Harper & R).
- Rahmatika, N. A., & Imron, M. (2022). Pengaruh Kemandirian Daerah, Solvabilitas, Level of Capital Outlay Terhadap Financial Distress Pada Saat Pandemi COVID-19 Melalui Jumlah Penduduk Sebagai Pemoderasi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Tahun 2019-2022. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 437–444.
- Ritonga, I. T. (2023). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Kedua). Pustaka Pelajar.
- Sari, M., & Arza, F. I. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kondisi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Periode 2015-2017. *Wahana Riset Akuntansi*, 7(1), 1425. <https://doi.org/10.24036/wra.v7i1.104566>

- Sarumaha, Yeni, R. S., Sari, F., & Riri, yosi P. M. (2021). Pengaruh Arus Kas Pendanaan Laba Bersih dan Leverage Terhadap Financial Distress dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi: Studi Empiris Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Pundi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31575/jp.v5i2.363>
- Subhan, Widodo, A. H. W., & Sujianto, A. E. (2024). Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi di Daerah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(5), 3205–3210. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1519>
- Winarna, J., Widagdo, A. K., & Setiawan, D. (2017). Financial Distress of Local Government: A Study on Local Government Characteristics, Infrastructure, and Financial Conditions. *Global Business Finance Review*, 22(2), 34–47.